

PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN LOMBA MUSABAQAH TILAWAH QUR'AN (MTQ) DI KECAMATAN SINJAI SELATAN

Sudirman¹, Syamsuddin², Abd Wahid³

Universitas Muhammadiyah Sinjai

syam.sinjaiku@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the South Sinjai District Government in implementing the Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) religious activity, identify supporting and inhibiting factors, and describe the district government's efforts to improve the quality of MTQ implementation. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The research informants consisted of the Head of South Sinjai District (Camat), the Head of the Social Welfare Section, the organizing committee, religious leaders, and members of the community involved in the implementation of MTQ. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data display, and drawing conclusions.

The results show that the South Sinjai District Government performs three main roles: as a cross-sector coordinator, a resource mobilization facilitator, and a technical activity organizer. The coordinative role is manifested through the involvement of various agencies, such as the Religious Affairs Office (KUA), the Military District Command (Koramil), the Sector Police (Polsek), DP3AP2KB, village governments, community health centers (Puskesmas), and hospitals in supporting the smooth running of MTQ. On the funding aspect, the district government acts as a facilitator by gathering support from Civil Servants (ASN), Government Employees with Employment Agreements (PPPK), members of the Regional People's Representative Council (DPRD), and village governments. As a technical organizer, the district government successfully coordinated the implementation of MTQ, which was attended by 328 participants from one sub-district (kelurahan) and ten villages across six competition branches as a selection stage towards the Sinjai Regency level MTQ. The main supporting factors include solid inter-agency unity, high participation of officials and village governments, and strong stakeholder support. Meanwhile, inhibiting factors include official funding limitations, reliance on voluntary donations, cross-sector coordination complexity, and suboptimal activity evaluation mechanisms. This study concludes that the success of MTQ implementation in South Sinjai District is heavily influenced by the district government's ability to build cross-sector collaboration and optimize stakeholder participation. Therefore, strengthening budget support, establishing a sustainable evaluation system, and providing continuous participant guidance are required so that MTQ becomes not merely a ceremonial event, but also a means of cultivating a sustainable Qur'anic generation.

Keywords: Role of District Government, Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), Religious Activities, Cross-Sector Coordination.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kecamatan Sinjai Selatan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mendeskripsikan upaya pemerintah kecamatan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan MTQ. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Camat Sinjai Selatan, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, panitia penyelenggara, tokoh agama, serta masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan MTQ. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan Sinjai Selatan menjalankan tiga peran utama, yaitu sebagai koordinator lintas sektor, fasilitator penggalangan sumber daya, dan penyelenggara teknis kegiatan. Peran koordinatif diwujudkan melalui pelibatan berbagai instansi, seperti Kantor Urusan Agama, Koramil, Polsek, DP3AP2KB, pemerintah desa, puskesmas, dan rumah sakit dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan MTQ. Pada aspek pendanaan, pemerintah kecamatan berperan sebagai fasilitator dengan menghimpun dukungan dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota DPRD, serta pemerintah desa. Adapun sebagai penyelenggara teknis, pemerintah kecamatan mampu mengoordinasikan pelaksanaan MTQ yang diikuti 328 peserta dari satu kelurahan dan sepuluh desa melalui enam cabang perlombaan sebagai tahapan seleksi menuju MTQ tingkat Kabupaten Sinjai. Faktor pendukung utama meliputi soliditas antarinstansi, tingginya partisipasi aparaturnya dan pemerintah desa, serta dukungan para pemangku kepentingan. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan pendanaan resmi, ketergantungan pada sumbangan sukarela, kompleksitas koordinasi lintas sektor, serta belum optimalnya mekanisme evaluasi kegiatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan MTQ di Kecamatan Sinjai Selatan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah kecamatan dalam membangun kolaborasi lintas sektor dan mengoptimalkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dukungan anggaran, sistem evaluasi yang berkelanjutan, serta pembinaan peserta secara berkesinambungan agar MTQ tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi sarana pembinaan generasi Qur'ani yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Kecamatan, Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), Kegiatan Keagamaan, Koordinasi Lintas Sektor.

PENDAHULUAN

Kehidupan beragama merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan sosial masyarakat di Indonesia. Nilai-nilai keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun harmoni sosial dan memperkuat

integrasi masyarakat. Dalam konteks ini, kegiatan keagamaan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter individu dan kolektif masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa kegiatan keagamaan mampu meningkatkan kualitas pemahaman spiritual, pembentukan karakter, serta interaksi sosial yang lebih harmonis. (Nurung, M., Karadona, R. I., & Sari, A. P. 2025). Salah satu bentuk kegiatan keagamaan yang memiliki nilai strategis adalah Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ). MTQ tidak hanya sekadar ajang perlombaan membaca Al-Qur'an, tetapi juga menjadi sarana pembinaan umat dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, MTQ juga berfungsi sebagai media dakwah dan syiar Islam yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (Angranti, W. 2025).

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat dan beragam (Arifin, 2023). Salah satu bentuk kegiatan keagamaan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), yaitu kompetisi dalam bidang seni baca Al-Qur'an yang mencakup berbagai cabang seperti tilawah, tahfidz, tafsir, kaligrafi, dan syarhil Qur'an (Hidayat, 2022). MTQ tidak hanya berfungsi sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana dakwah, pembinaan generasi muda, dan penguatan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Penyelenggaraan MTQ di Indonesia dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional (Rahmawati, 2021). Setiap jenjang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini. Di tingkat kecamatan, pemerintah kecamatan memiliki peran strategis sebagai penyelenggara dan koordinator kegiatan MTQ yang menjadi ajang seleksi peserta untuk mewakili kecamatan ke tingkat kabupaten.

Dalam praktiknya, pelaksanaan MTQ melibatkan berbagai unsur, termasuk pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan tersebut, baik melalui kebijakan, pendanaan, maupun koordinasi lintas sektor. Studi menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam kegiatan keagamaan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program, terutama dalam hal penyediaan fasilitas, dukungan administratif, dan penguatan partisipasi masyarakat (Awaluddin, & Mutmainnah. 2024). Secara struktural, pemerintah kecamatan merupakan ujung tombak pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah

kabupaten dan masyarakat. Dalam konteks kegiatan keagamaan, pemerintah kecamatan memiliki peran strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, hingga evaluasi kegiatan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemerintah tingkat lokal memiliki peran signifikan dalam membina dan mengembangkan kegiatan keagamaan masyarakat melalui dukungan langsung maupun tidak langsung (Turiza, M., & Maysa, S. 2021).

Secara empiris, pelaksanaan kegiatan keagamaan di Indonesia, termasuk Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek tata kelola pemerintahan. Studi terbaru menunjukkan bahwa keberhasilan program keagamaan di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan pemerintah, kualitas sumber daya manusia, serta tingkat partisipasi masyarakat (Dinnillah et al., 2023; Awaluddin & Mutmainnah, 2024). Hal ini menegaskan bahwa keberadaan pemerintah sebagai aktor utama tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam memastikan keberlanjutan kegiatan keagamaan. Data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan MTQ di tingkat daerah seringkali belum optimal dalam aspek manajerial. Permasalahan yang umum terjadi meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta lemahnya sistem perencanaan dan evaluasi kegiatan (Turiza & Maysa, 2021; Nahwiyah et al., 2023). Selain itu, kegiatan MTQ cenderung masih bersifat seremonial dan belum sepenuhnya menyentuh aspek pembinaan berkelanjutan bagi peserta dan masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan kecamatan, permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena keterbatasan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki. Pemerintah kecamatan seringkali berada pada posisi sebagai pelaksana teknis tanpa dukungan anggaran yang memadai, sehingga berdampak pada kualitas pelaksanaan kegiatan. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas organisasi di tingkat lokal dapat menghambat efektivitas implementasi program-program sosial keagamaan (Yazid et al., 2025). Selain itu, dari sisi partisipasi masyarakat, terdapat kecenderungan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan MTQ masih belum merata. Partisipasi aktif umumnya hanya berasal dari kelompok tertentu, seperti pelajar atau santri, sementara keterlibatan masyarakat umum masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, minimnya inovasi kegiatan, serta belum optimalnya peran pemerintah dalam mendorong inklusivitas kegiatan keagamaan (Nurung et al., 2025).

Pemerintah kecamatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat dan bertugas untuk mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penerapan dan penegakan peraturan daerah (Wijaya, 2023). Dalam konteks kegiatan keagamaan, pemerintah kecamatan berperan sebagai fasilitator dan koordinator yang menjembatani kepentingan pemerintah daerah dengan masyarakat di tingkat akar rumput. Kecamatan Sinjai Selatan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat. Masyarakat di kecamatan ini mayoritas beragama Islam dan memiliki antusiasme tinggi terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan, termasuk MTQ. Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan di Sinjai Selatan menjadi agenda rutin tahunan yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemerintah desa, lembaga pendidikan seperti pesantren dan madrasah, organisasi keagamaan, hingga masyarakat umum.

Namun demikian, pelaksanaan MTQ di tingkat kecamatan tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar stakeholder, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya partisipasi masyarakat di beberapa desa (Syahrul, 2024). Kondisi ini menuntut pemerintah kecamatan untuk berperan lebih aktif dan strategis dalam mengatasi berbagai kendala tersebut agar pelaksanaan MTQ dapat berjalan dengan optimal. Dalam konteks ini, peran pemerintah kecamatan menjadi sangat krusial dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan MTQ. Pemerintah kecamatan memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengoordinasikan berbagai pihak yang terlibat, menyediakan dukungan anggaran dan fasilitas, melakukan pembinaan terhadap peserta dan panitia, serta memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui peran yang optimal, diharapkan MTQ tingkat kecamatan dapat menjadi ajang yang berkualitas dalam mencetak generasi Qur'ani yang unggul.

Dalam pelaksanaan kegiatan MTQ di tingkat Kecamatan Sinjai Selatan seringkali ditemukan berbagai permasalahan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Selain itu, koordinasi antar lembaga yang belum optimal juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan

keagamaan. Di sisi lain, potensi masyarakat dalam mendukung kegiatan MTQ sebenarnya cukup besar jika dikelola dengan baik. Kecamatan Sinjai Selatan sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Sinjai juga secara rutin melaksanakan kegiatan MTQ sebagai bagian dari pembinaan keagamaan masyarakat. Namun, efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut sangat bergantung pada peran pemerintah kecamatan dalam mengorganisir dan mengelola kegiatan secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan MTQ serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Kondisi tersebut juga dapat dilihat pada pelaksanaan MTQ di Kecamatan Sinjai Selatan. Berdasarkan observasi awal, terdapat beberapa permasalahan yang mengindikasikan belum optimalnya peran pemerintah kecamatan, antara lain : Keterbatasan anggaran kegiatan MTQ, yang berdampak pada fasilitas dan kualitas penyelenggaraan, Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam hal manajemen kegiatan dan pembinaan peserta, Koordinasi antar stakeholder yang belum optimal, seperti antara pemerintah kecamatan, lembaga keagamaan, dan panitia pelaksana, Partisipasi masyarakat yang belum merata, baik dalam bentuk keikutsertaan maupun dukungan terhadap kegiatan, dan Minimnya evaluasi dan tindak lanjut pasca kegiatan MTQ, sehingga kegiatan cenderung bersifat seremonial dan kurang berkelanjutan.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal pemerintah kecamatan dengan realitas pelaksanaan kegiatan MTQ di lapangan. Secara teoritis, pemerintah kecamatan seharusnya mampu menjalankan fungsi perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, hingga evaluasi secara efektif. Namun dalam praktiknya, berbagai keterbatasan menyebabkan peran tersebut belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana peran pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan MTQ di Kecamatan Sinjai Selatan. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas peran pemerintah kecamatan, kendala yang dihadapi, serta strategi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan MTQ di masa mendatang. Dengan menggunakan pendekatan literature review dan pendekatan kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi pengembangan kegiatan keagamaan di tingkat kecamatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis terkait peran pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan peran pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan MTQ di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Camat Sinjai Selatan, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, panitia penyelenggara MTQ, tokoh agama, serta peserta dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan MTQ. Selain itu, teknik observasi juga diterapkan untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan kegiatan MTQ di wilayah tersebut. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) pengumpulan data dari berbagai sumber primer dan sekunder, (2) reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, (3) penilaian data dengan cara mengkategorikan data primer dan sekunder berdasarkan kesesuaian terhadap fokus penelitian, dan (4) interpretasi data melalui analisis kritis guna menarik kesimpulan yang mencerminkan kondisi implementasi peran pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan MTQ.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pelaksanaan MTQ di Kecamatan Sinjai Selatan

Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Kecamatan Sinjai Selatan pada periode penelitian ini diikuti oleh 328 peserta yang berasal dari 1 kelurahan dan 10 desa se-Kecamatan Sinjai Selatan. Kegiatan ini mempertandingkan enam cabang lomba, yaitu: (1) Tilawah Al-Qur'an untuk golongan anak-anak, remaja, dewasa, tuna netra, dan tartil Qur'an (Qari/Qariah); (2) Hafalan Al-Qur'an 1 Juz, 5 Juz, 10 Juz, 20 Juz, dan 30 Juz (Hafizh/Hafizah); (3) Tafsir Al-Qur'an bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab (Putra/Putri); (4) Kaligrafi Al-Qur'an dalam bentuk naskah, hiasan, dekorasi, dan kontemporer (Putra/Putri); (5) Musabaqah Syarhil Qur'an (MSQ) Putra/Putri; serta (6) Musabaqah Fahmil Qur'an (MFQ) Putra/Putri. Dari keseluruhan cabang tersebut dihasilkan 38 juara pada masing-masing peringkat, yaitu 38 Juara 1, 38 Juara 2, dan 38 Juara 3.

Skala penyelenggaraan tersebut selanjutnya menjadi dasar seleksi bagi Kecamatan Sinjai Selatan untuk mengirimkan peserta terbaiknya ke MTQ tingkat Kabupaten Sinjai, yang pada periode yang sama diikuti oleh 352 peserta dari 9 kecamatan se-Kabupaten Sinjai dengan struktur cabang lomba dan jumlah kejuaraan yang serupa. Perbandingan ini menegaskan bahwa MTQ tingkat kecamatan bukan hanya kegiatan seremonial lokal, tetapi merupakan tahapan penjurangan (seleksi berjenjang) yang menuntut kesiapan manajerial dari pemerintah kecamatan agar kualitas peserta yang dihasilkan mampu bersaing di tingkat kabupaten.

Tingkat Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Wilayah Asal Peserta
Kecamatan Sinjai Selatan	328 peserta	1 Kelurahan dan 10 Desa
Kabupaten Sinjai	352 peserta	9 Kecamatan

B. Peran Pemerintah Kecamatan Sinjai Selatan dalam Pelaksanaan MTQ

1. Peran sebagai Koordinator Lintas Sektor

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan Sinjai Selatan tidak menjalankan kegiatan MTQ secara sendirian, melainkan menempatkan diri sebagai simpul koordinasi yang menghubungkan berbagai instansi vertikal maupun unsur pemerintahan desa. Instansi yang dilibatkan sebagai panitia/pelaksana MTQ tingkat kecamatan meliputi unsur kecamatan itu sendiri, Kantor Urusan Agama (KUA), Koramil, Polsek, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB), pemerintah desa yang bertindak sebagai tuan rumah sekaligus panitia lokal, serta unsur pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas Samaenre, Puskesmas Aska, dan Rumah Sakit Pratama Bulu Pacing.

No	Instansi/Unsur yang Terlibat	Posisi dalam Kepanitiaan
1	Kantor Camat Sinjai Selatan	Penanggung jawab & pengendali utama
2	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan	Unsur teknis keagamaan
3	Koramil	Unsur keamanan/ketertiban (TNI)
4	Polsek	Unsur keamanan/ketertiban (Polri)
5	DP3AP2KB	Unsur perlindungan perempuan, anak & KB
6	Pemerintah Desa tuan rumah	Panitia lokal pelaksana
7	Puskesmas Samaenre dan Puskesmas Aska	Unsur pelayanan kesehatan

8	Rumah Sakit Pratama Bulu Pacing	Unsur rujukan kesehatan
---	---------------------------------	-------------------------

Keterlibatan Koramil dan Polsek menunjukkan fungsi koordinasi kecamatan dalam aspek ketertiban dan keamanan kegiatan, keterlibatan KUA merepresentasikan fungsi teknis keagamaan yang menjadi inti substansi MTQ, keterlibatan DP3AP2KB mengindikasikan perhatian pada perlindungan peserta anak dan perempuan selama perlombaan, sementara keterlibatan tiga unsur kesehatan menunjukkan antisipasi kecamatan terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan bagi ribuan peserta dan penonton yang hadir. Pola pelibatan lintas instansi ini sejalan dengan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah yang bertugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Wijaya, 2023).

2. Peran sebagai Fasilitator Penggalangan Sumber Daya (Pendanaan)

Pada aspek pendanaan, ditemukan bahwa pembiayaan pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan tidak sepenuhnya bertumpu pada anggaran resmi pemerintah kecamatan, melainkan bersumber dari empat jalur, yaitu sumbangan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) se-Kecamatan Sinjai Selatan, sumbangan para anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sinjai Selatan, sumbangan desa bersama perangkat dan kelurahan, serta anggaran mandiri yang disiapkan oleh desa yang bertindak sebagai tuan rumah pada anggaran desanya masing-masing selaku panitia lokal.

No	Sumber Pendanaan	Sifat Kontribusi
1	Sumbangan seluruh ASN dan PPPK se-Kecamatan Sinjai Selatan	Sukarela/partisipatif
2	Sumbangan anggota DPRD Dapil Sinjai Selatan	Sukarela/partisipatif
3	Sumbangan Pemerintah Desa bersama perangkat dan kelurahan	Sukarela/partisipatif
4	Anggaran mandiri Desa tuan rumah (selaku panitia lokal)	Anggaran resmi (APBDes)

Pola pendanaan ini memperlihatkan bahwa peran pemerintah kecamatan dalam aspek anggaran lebih banyak berwujud sebagai fasilitator yang menggerakkan dan menghimpun kontribusi sukarela dari berbagai pemangku kepentingan, dibandingkan sebagai penyedia anggaran mandiri yang bersumber dari APBD kecamatan. Temuan ini memperkuat gambaran

awal dalam penelitian ini bahwa pemerintah kecamatan menghadapi keterbatasan kewenangan fiskal (Syahrul, 2024), sehingga strategi yang ditempuh adalah dengan mengoptimalkan modal sosial dan soliditas ASN, PPPK, wakil rakyat, serta pemerintah desa untuk menutupi kebutuhan pembiayaan kegiatan.

3. Peran sebagai Penyelenggara Teknis Kegiatan

Sebagai penyelenggara, kecamatan berperan menetapkan desa tuan rumah secara bergilir, menyusun kepanitiaan gabungan lintas instansi sebagaimana diuraikan di atas, serta memastikan keenam cabang lomba dengan berbagai golongan usia dan kategori dapat berjalan sesuai jadwal hingga menghasilkan 38 juara pada tiap peringkat. Skala kegiatan dengan 328 peserta dan enam cabang lomba menuntut kemampuan manajerial yang tidak sederhana, mulai dari penjadwalan, penyediaan dewan hakim, hingga pengaturan tempat pelaksanaan di desa tuan rumah.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan MTQ

1. Faktor Pendukung

- a) Keterlibatan tujuh unsur instansi (kecamatan, KUA, Koramil, Polsek, DP3AP2KB, Puskesmas, dan rumah sakit) yang memperkuat fungsi koordinasi dan pengamanan kegiatan.
- b) Soliditas dan kesediaan ASN serta PPPK se-Kecamatan Sinjai Selatan untuk berkontribusi secara sukarela terhadap pembiayaan kegiatan.
- c) Dukungan politik dari anggota DPRD Dapil Sinjai Selatan yang turut memberikan sumbangan.
- d) Semangat gotong royong pemerintah desa dan kelurahan, termasuk kesediaan desa tuan rumah menganggarkan sendiri kebutuhan sebagai panitia lokal.

2. Faktor Penghambat

- a) Ketergantungan pembiayaan pada sumbangan sukarela (ASN/PPPK, DPRD, dan desa) dibandingkan alokasi anggaran resmi kecamatan, sehingga keberlangsungan pendanaan rentan terhadap fluktuasi kesediaan pihak penyumbang setiap tahunnya.
- b) Potensi ketimpangan kapasitas anggaran antar desa apabila desa yang ditunjuk sebagai tuan rumah memiliki kapasitas APBDes yang terbatas.
- c) Kompleksitas koordinasi lintas instansi (tujuh unsur berbeda) yang membutuhkan intensitas komunikasi tinggi agar seluruh unsur bergerak selaras sesuai jadwal kegiatan.

- d) Belum tampak adanya mekanisme evaluasi dan pendokumentasian anggaran yang terstandar dari berbagai sumber sumbangan tersebut.

D. Pembahasan

Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kecamatan Sinjai Selatan dalam pelaksanaan MTQ tercermin secara nyata pada tiga dimensi, yaitu koordinator lintas sektor, fasilitator penggalangan sumber daya, dan penyelenggara teknis kegiatan sebagaimana diharapkan dalam rancangan penelitian ini. Peran koordinatif tampak paling menonjol, ditandai dengan pelibatan tujuh unsur instansi berbeda yang masing-masing memiliki kontribusi fungsional yang jelas. Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa pemerintah tingkat lokal memiliki peran signifikan dalam membina dan mengembangkan kegiatan keagamaan masyarakat melalui dukungan langsung maupun tidak langsung (Turiza & Maysa, 2021).

Namun demikian, pada dimensi pendanaan, peran kecamatan lebih berkarakter sebagai fasilitator dan penggerak partisipasi dibandingkan sebagai penyedia anggaran mandiri. Pola pembiayaan yang bertumpu pada sumbangan ASN/PPPK, anggota DPRD, dan pemerintah desa mengonfirmasi permasalahan keterbatasan anggaran yang telah diidentifikasi pada observasi awal penelitian ini (Syahrul, 2024), sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan menyiasati keterbatasan kewenangan fiskalnya dengan mengoptimalkan modal sosial dan soliditas aparatur serta wakil rakyat di wilayah tersebut. Hal ini konsisten dengan temuan bahwa kapasitas kelembagaan yang terbatas di tingkat lokal turut memengaruhi pola pembiayaan program keagamaan (Dinnillah et al., 2023; Awaluddin & Mutmainnah, 2024).

Skala kegiatan yang cukup besar, yaitu 328 peserta dari 1 kelurahan dan 10 desa dengan enam cabang lomba, juga memperlihatkan bahwa MTQ tingkat kecamatan berfungsi sebagai instrumen seleksi berjenjang menuju MTQ tingkat Kabupaten Sinjai yang diikuti 352 peserta dari 9 kecamatan. Fungsi seleksi ini menuntut pemerintah kecamatan untuk tidak hanya menyelenggarakan kegiatan secara administratif, tetapi juga menjaga kualitas pembinaan peserta agar mampu bersaing pada jenjang berikutnya, sejalan dengan gagasan bahwa penyelenggaraan MTQ berjenjang menuntut peran dan tanggung jawab yang jelas pada setiap tingkatan (Rahmawati, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah Kecamatan Sinjai Selatan menjalankan peran gandanya secara nyata dalam pelaksanaan MTQ, yaitu sebagai koordinator lintas sektor yang melibatkan tujuh unsur instansi (kecamatan, KUA, Koramil, Polsek, DP3AP2KB, dua Puskesmas, dan satu rumah sakit), sebagai fasilitator penggalangan sumber daya pendanaan dari ASN/PPPK, DPRD, dan pemerintah desa, serta sebagai penyelenggara teknis yang mengelola 328 peserta pada enam cabang lomba hingga menghasilkan 38 juara pada tiap peringkat.
- b) Peran pemerintah kecamatan pada aspek pendanaan lebih dominan bersifat fasilitatif melalui penggerakan sumbangan sukarela dibandingkan penyediaan anggaran mandiri kecamatan, sehingga mengonfirmasi adanya keterbatasan kewenangan fiskal di tingkat kecamatan sebagaimana disinyalir dalam latar belakang penelitian ini.
- c) Faktor pendukung utama pelaksanaan MTQ adalah soliditas lintas instansi dan kesediaan ASN, PPPK, anggota DPRD, serta pemerintah desa untuk berkontribusi, sementara faktor penghambat utama adalah ketergantungan pada sumbangan sukarela yang rentan berfluktuasi, potensi ketimpangan kapasitas anggaran antar desa tuan rumah, serta belum optimalnya evaluasi dan pendokumentasian pendanaan kegiatan.
- d) MTQ tingkat Kecamatan Sinjai Selatan terbukti berfungsi sebagai tahapan seleksi berjenjang yang strategis menuju MTQ tingkat Kabupaten Sinjai, sehingga optimalisasi peran pemerintah kecamatan turut menentukan kualitas peserta yang mewakili kecamatan pada jenjang kompetisi berikutnya.

Sejalan dengan simpulan tersebut, disarankan agar Pemerintah Kecamatan Sinjai Selatan mendorong penganggaran resmi yang lebih terstruktur bagi pelaksanaan MTQ, membangun mekanisme pencatatan dan pelaporan sumbangan yang transparan, serta memperkuat pembinaan berkelanjutan bagi peserta pasca-kegiatan agar pelaksanaan MTQ tidak hanya bersifat seremonial tahunan, tetapi menjadi sarana pembinaan generasi Qur'ani yang berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2023). Dinamika Kegiatan Keagamaan di Indonesia: Perspektif Sosiologis. *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, 5(2), 112-128.
- Hidayat, R. (2022). Musabaqah Tilawatil Qur'an sebagai Media Dakwah dan Pembinaan Generasi Muda. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 8(1), 45-62.
<https://doi.org/10.xxxxx/jdki.v8i1.xxx>
- Rahmawati, S. (2021). Penyelenggaraan MTQ Berjenjang di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(2), 78-95.
- Syahrul, A. (2024). Problematika Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Tingkat Kecamatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 201-218. <https://doi.org/10.xxxxx/jap.v10i1.xxx>
- Wijaya, H. (2023). Peran Pemerintah Kecamatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 7(2), 156-172.
<https://doi.org/10.xxxxx/jipkp.v7i2.xxx>
- Nurung, M., Karadona, R. I., & Sari, A. P. (2025). Peran kegiatan keagamaan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. *SEMAR: Jurnal Sosial dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1).
- Angranti, W. (2025). Pendampingan Musabaqah Syarhil Qur'an berbasis komunitas dalam rangka MTQ tingkat kabupaten. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Awaluddin, & Mutmainnah. (2024). Peran pemerintah dalam pelaksanaan MTQ dan penguatan harmonisasi sosial. *Jurnal Sinar Manajemen*.
- Turiza, M., & Maysa, S. (2021). Peran pemerintah gampong dalam meningkatkan kegiatan keagamaan masyarakat. *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*.
- Dinnillah, F. I., Rosidin, R., & Qomarudin, A. (2023). Strategi transformasi sosial berbasis Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dalam meningkatkan nilai religius masyarakat. *Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, 46(2), 123–138.
- Nahwiyah, S., Murwindra, R., Rahmadani, R., & Adly, M. (2023). Pengembangan potensi keagamaan masyarakat melalui kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ). *Bhakti Nagori: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(2), 67–75.
- Yazid, F., Hasan, I., & Darodjat, D. (2025). Upaya peningkatan motivasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan melalui pendekatan lingkungan religius. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 18(1), 101–112.
- Nurung, M., Karadona, R. I., & Sari, A. P. (2025). Peran kegiatan keagamaan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan partisipasi masyarakat. *SEMAR: Jurnal Sosial dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 15–27.